

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korea dahulunya merupakan negara yang berada di bawah pemerintahan yang sama hampir 1300 tahun (Oberdorfer & Carlin, 1997). Kondisi geografis Korea yang terletak diantara negara-negara berkekuatan besar menempatkan Kawasan ini sebagai jalur perdagangan yang sangat strategis, sehingga sejak dahulu kala, Korea telah menjadi negara yang terus menerus di perebutkan oleh berbagai negara besar di sekitarnya seperti bangsa Mongol, Tiongkok. Sejak memasuki abad ke-20 Korea berada di bawah kekuasaan Jepang selama hampir 35 tahun, yang kemudian terbebas dari belenggu Jepang dan merdeka pada tahun 1945 ketika Jepang menyerah tanpa syarat secara resmi pada Amerika Serikat (Syafira, 2021).

Gambar 1. 1 Peta Korea



Sumber : <https://id.korean-culture.org/id/171/korea/65>

Namun kegembiraan bangsa Korea atas kemerdekaannya tidak bertahan lama, bangsa ini harus kembali menghadapi kesedihan karena harus berpisah dengan saudara setanah airnya sebagai imbas dari pembagian wilayah di Semenanjung Korea oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet sesuai dengan garis 38 derajat lintang utara (*38th parallel*), di mana Uni Soviet mendaratkan pasukannya di arah Utara wilayah Korea, dan Amerika Serikat dengan pasukannya di arah selatan, tindakan ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan pihak mana pun mengendalikan seluruh wilayah Semenanjung Korea (Hanneka, 2006; Seung-Yoon & Setiawati, 2003). Ditambah dengan adanya perpecahan sekutu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang disebabkan oleh hegemoni

keduanya negara serta perbedaan ideologi masing-masing akhirnya mendorong Korea masuk ke dalam pusaran konflik yang berujung perang saudara (Seung-Yoon & Setiawati, 2003).

Pasca berakhirnya perang Korea dengan gencatan senjata pada tahun 1953, Korea Selatan dan Korea Utara mulai sibuk untuk mengembangkan dan memperkuat kekuatannya masing-masing. Pada masa inilah Korea Selatan menganggap Korea Utara sebagai musuh karena memiliki ideologi yang berseberangan ditambah lagi berbagai konfrontasi dan serangan terus dilancarkan oleh Korea Utara kepada Korea Selatan. Akibatnya hubungan kedua negara menjadi sangat buruk sehingga interaksi antar-Korea bisa dikatakan hampir tidak ada selama beberapa dekade awal pasca perang Korea (Hanafiaty, 2019; Seung Yoon & Mas' oed, 2005). Memasuki masa pemerintahan Presiden Park Chung-Hee, pandangan Korea Selatan terhadap Korea Utara sedikit demi sedikit mulai berubah, dari awalnya memandang Korea Utara sebagai musuh perlahan mulai memandang Korea Utara sebagai saudara senasib sepenanggungan yang juga ikut menjadi korban dari tragedi yang terjadi di Semenanjung. Presiden Park menganggap bahwasanya berbagai konflik di Semenanjung Korea sehingga menyebabkan Korea terpecah menjadi dua negara adalah peristiwa yang sangat mengerikan dan bukanlah keinginan yang datang dari dalam diri bangsa Korea sendiri akan melainkan keinginan dari negara lain, sehingga Korea Selatan mencoba memperbaiki hal tersebut dengan mencoba menjalin pendekatan damai terhadap Korea Utara agar ingin sedikit demi sedikit meredakan permusuhan antara satu sama lain agar dapat memulai hubungan baru untuk bisa bekerja sama (Hanafiaty, 2019).

Salah satu kebijakan yang menghasilkan perubahan positif yang signifikan pada hubungan Korea Selatan dan Korea Utara adalah melalui Kebijakan *The Sunshine Policy* atau Kebijakan Sinar Matahari yang dibentuk dan digagas pertama kali pada tahun 1998 oleh Kim Dae-Jung selaku Presiden ke-15 Korea Selatan. Ini adalah bentuk kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara yang dibuat untuk meningkatkan hubungan diplomatik yang damai antara keduanya agar dapat menjalin kerja sama dalam berbagai bidang serta memajukan rekonsiliasi yang mengarah pada penyatuan Korea kembali (Studi Hubungan Internasional FISIP UPN & Timur, 2017). Istilah *The Sunshine Policy* ini berasal dari salah satu dongeng di Korea yang berjudul "*The North Wind and the Sun*" yang menceritakan tentang angin dan matahari yang bersaing satu sama lain untuk bisa membuat seorang anak laki-laki melepaskan mantelnya. Saat angin berhembus dengan kencang ternyata tidak membuat anak laki-laki tersebut melepaskan jaketnya. Sehingga matahari menggunakan kekuatan penghangatnya, dan ternyata berhasil membuat laki-laki tersebut melepaskan mantelnya dengan sukarela ("*Sunshine Policy*," 2015).

Kebijakan *The Sunshine Policy* yang digagas oleh Kim Dae-Jung adalah sebuah prestasi yang mampu memberikan perubahan positif dan signifikan pada hubungan Korea Selatan dan Korea

Utara, karena mampu membuka pertemuan pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara untuk pertama kalinya sejak perang Korea tahun 1950-1953 pada tahun 2000 (Pearl Jinju, 2014). Tidak hanya itu Presiden Kim Dae-Jung berhasil mengedepankan cara-cara damai dalam membangun kembali hubungan antar kedua negara dengan berhasil mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (*Inter-Korean Summit*) dan berbagai pertemuan lainnya yang menghasilkan *South-North Joint Declaration*, yang menjadi landasan berbagai kerja sama antar Korea seperti mengenai pembangunan pariwisata di gunung Geumgang, mengadakan pertemuan pada keluarga yang terpisah (Ministry of Unification, 2001). Memberikan bantuan kemanusiaan, serta membangun *Kaesong Industrial Complex* di perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara (Foreign Affairs Analyst, 2001).

Tetapi dalam pelaksanaannya *The Sunshine Policy* juga tidak selalu menghasilkan hal yang positif, hal ini terbukti dengan aksi Korea Utara yang mulai mengembangkan uji coba nuklirnya kembali pada tahun 2002 yang tentu saja membuat terancamnya stabilitas keamanan Korea Selatan, ditahun yang sama terjadi pertempuran di wilayah laut perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara menyebabkan korban di kedua belah pihak. Situasi ini mengakibatkan ketidaksesuaian pelaksanaan *The Sunshine Policy* dengan kesepakatan awal yang tercantum dalam *South-North Joint Declaration* bahwa kedua negara harus meredam ketegangan dan menjunjung tinggi perdamaian di Kawasan Semenanjung Korea (Gunawan, 2015).

Roh Moo-Hyun terpilih menjadi Presiden Korea Selatan menggantikan Kim Dae-Jung pada tahun 2003. Roh Moo-Hyun dikenal sebagai salah satu tokoh liberal di Korea Selatan dan dalam setiap pidatonya selama berkampanye selalu mengatakan bahwa *The Sunshine Policy* masih diperlukan harus tetap dilaksanakan demi kemakmuran dan eksistensi bangsa. Pada pidato pelantikannya sebagai presiden, Roh Moo-Hyun menyatakan niatnya untuk mempertahankan kerangka umum yang terdapat dalam kebijakan *The Sunshine Policy*. Kebijakan luar negeri ini pun diberi nama *the Policy of Peace and Prosperity*. Secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian di Timur Laut Asia melalui penyelesaian damai dengan Korea Utara serta membangun komunitas ekonomi antar Korea (*Inter-Korean Economic Community*). Sehingga di masa pemerintahannya *The Sunshine Policy* tidak hanya fokus pada upaya rekonsiliasi antar kedua Kora untuk semakin memperkuat kesejahteraan dan kemakmuran di Semenanjung Korea tetapi juga bertujuan untuk menjadikan Korea Selatan sebagai pusat ekonomi di Kawasan Asian Timur laut (Choong Nam, 2005).

Melalui kebijakan luar negeri *the Policy of Peace and Prosperity*, Roh Moo-Hyun berupaya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Korea Utara yang telah dibangun sejak masa pemerintahan Presiden sebelumnya, yaitu Presiden Kim Dae-Jung. Roh Moo-Hyun juga melanjutkan implementasi berbagai kesepakatan yang sudah diperoleh antara Korea Selatan dan

Korea Utara sebelumnya. Beliau melanjutkan proyek – proyek yang sudah direncanakan pada masa pemerintahan presiden Kim Dae-Jung seperti kawasan wisata dan turisme Gunung Geumgang (Putri, 2015) Selain itu, pemerintah Korea Selatan di masa pemerintahan Roh Moo-Hyun, menyetujui untuk memberikan bantuan berupa dana ataupun kebutuhan lainnya kepada Korea Utara sebagai bentuk upaya mempertahankan hubungan dengan Korea Utara. Tercatat pada tahun 2003 hingga 2004 Korea Selatan telah memasok lebih dari 300.000 Ton pupuk dan 400.000 ton beras.

Tidak hanya bantuan berupa bahan kebutuhan tetapi Korea Selatan juga memberikan bantuan berupa uang, tercatat berdasarkan laporan dari Kementerian Unifikasi Korea Selatan selama masa pemerintahan Roh Moo-Hyun, Korea Selatan telah memberikan bantuan dana senilai 140 juta dolar AS. Pemberian bantuan ini mengalami peningkatan dari masa pemerintahan sebelumnya (Choong Nam, 2005). Pelaksanaan *The Sunshine Policy* di masa Roh Moo-Hyun memang lebih berfokus pada bidang ekonomi karena menurutnya cara ini efektif untuk menuju reunifikasi kedua Korea, namun dalam pelaksanaan *The Sunshine Policy* di masa kepemimpinannya terdapat ketimpangan di mana tidak seimbang nya timbal balik yang didapatkan dalam hubungan kedua Korea ini, dibuktikan dengan masih terus dikembangkannya kekuatan nuklir di Korea Utara, serta kepercayaan Korea Selatan yang dimanfaatkan oleh Korea Utara untuk terus menerus meminta bantuan kepada Korea Selatan (Putri, 2015).

Sebelum di bawah kepemimpinan Moon Jae-In, Korea Selatan berada di bawah kepemimpinan Presiden Park-Geun Hye, dimasanya Korea Selatan menerapkan kebijakan *Trust-Building Process on the Korean Peninsula* yaitu upaya untuk mewujudkan kepercayaan diantara ke dua Korea Selatan dan Korea Utara dilandasi keamanan dalam menjalin hubungan (South Korea's Ministry of Unification, 2013), dan menggunakan pendekatan yang melibatkan pemberian imbalan dan hukuman, di mana Korea Selatan bersedia bekerja sama dalam bidang ekonomi dan memberikan bantuan kepada Korea Utara Jika negara tersebut menunjukkan sikap kerja sama, namun hal sebaliknya akan dilakukan oleh Korea Selatan jika Korea Utara melakukan berbagai tindakan yang dianggap mengancam terhadap pencapaian perdamaian di Semenanjung Korea (Swenson-Wright, 2015). ditambah dengan aktifnya latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat serta menerapkan sistem anti rudal atau THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*) yang merupakan hasil kerja sama dengan Amerika Serikat (Samosir, 2017). Membuat hubungan keduanya makin memburuk bahkan memutuskan segala bentuk hubungan antara kedua negara tersebut (Manan, 2013).

Ketika Moon Jae-In berhasil memenangkan pemilihan Presiden Korea Selatan pada tahun 2017. Selama pelaksanaan kampanye pemilihan Presiden, Moon Jae-In berjanji untuk membawa kembali kebijakan *The Sunshine Policy* dalam masa pemerintahannya nanti, dan bersumpah untuk

kembali menjalin kontak dengan Korea, Sehingga Moon Jae-In berharap dengan digunakannya kembali kebijakan *The Sunshine Policy* dapat memperbaiki kembali hubungan Korea Selatan dan Korea Utara (Noland & Boydston, 2017). Meskipun kebijakan *The Sunshine Policy* merupakan kebijakan yang sudah pernah digunakan oleh dua Presiden Korea Selatan sebelumnya yaitu Kim Dae-Jung dan Roh Moo-Hyun, tetapi Moon Jae-In memiliki cara sendiri dan lebih terbuka dalam menerapkan kebijakan tersebut dengan melakukan negosiasi berupa adanya dialog antara kedua pemerintah, melakukan kerja sama dalam berbagai bidang, serta pengiriman misi perdamaian yang dilakukan oleh Korea Selatan (Fiori, 2018).

Ketika sudah menjadi Presiden dan ingin mengimplementasikan Kebijakan *The Sunshine Policy*, Presiden Moon Jae-In menghadapi berbagai persoalan selain dihadapkan dengan memburuknya hubungan Korea Selatan dan Korea Utara akibat pendekatan yang keras pada masa pemerintah presiden sebelumnya. Moon Jae-In juga menghadapi tanggapan berbagai pihak yang meragukan efektifnya penggunaan kembali kebijakan luar negeri *The Sunshine Policy* di masa pemerintahannya. Hal ini dikarenakan kebijakan luar negeri *The Sunshine Policy* pada masa pemerintahan sebelumnya entah pada masa Presiden Kim Dae-Jung dan Roh Moo-Hyun mendapatkan banyak kritikan seperti pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae-Jung berbagai pihak mengkritik cara beliau yang dianggap terlalu lemah dalam menghadapi Korea Utara dibuktikan dengan kembali terjadinya pengembangan nuklir oleh Korea Utara pada tahun 2002. Sedangkan pada masa Pemerintahan Presiden Roh Moo-Hyun beliau menghadapi kritik karena dianggap terlalu banyak mengeluarkan anggaran untuk Korea Utara sehingga tidak berhasil menghadirkan hubungan timbal-balik yang seimbang dan menguntungkan kedua belah pihak (Gunawan, 2015; Lilis, 2014; Swenson-Wright, 2015). Merespons berbagai keraguan mengenai penggunaan kembali kebijakan luar negeri *The Sunshine Policy*, Moon Jae-In kembali menekankan bahwa *The Sunshine Policy* di masa pemerintahannya adalah versi terbaru dari *The Sunshine Policy* yang diterapkan pada masa pemerintahan terdahulunya, di mana beliau melihat bahwa untuk meningkatkan hubungan antar Korea adalah dengan mempertahankan pencapaian-pencapaian positif dari pemerintahan sebelumnya serta menggunakan pendekatan yang bersifat merangkul dan terbuka (Khalilah Mukarramah, 2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah : **Bagaimana Implementasi Kebijakan Luar Negeri *The Sunshine Policy* Korea Selatan Terhadap Korea Utara Di bawah Kepemimpinan Presiden Moon Jae-In Tahun 2017-2022?**

C. Kerangka Berpikir

1) Kebijakan Luar Negeri

Tiap negara memiliki kepentingan dan tujuan nasionalnya ketika berinteraksi dengan negara atau aktor lain dalam politik internasional. Rumusan kepentingan nasional suatu negara kemudian diformulasikan ke dalam kebijakan luar negeri. Sehingga kebijakan luar negeri suatu negara dapat berbeda-beda. (Hara, 2011) tergantung pada pada kondisi politik domestik, ekonomi, militer ataupun pengaruh internasional pada suatu negara seperti yang dijelaskan oleh William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul “*The Introduction to International Politics : A Theoretical Overview*” (Coplin, 1992).

Kebijakan luar negeri menurut Aleksius Jemadu (2008) merupakan alat kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara yang memiliki kedaulatan untuk menjalin hubungan dengan pihak lain dalam politik global dengan maksud untuk mencapai tujuan nasionalnya (Jemadu, 2008). Oleh karena itu, kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai suatu strategi, rencana, atau langkah yang diambil oleh para pengambil keputusan negara untuk menghadapi negara atau pihak lain dalam politik internasional dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, dan untuk mencapai hal tersebut sebuah negara melakukan berbagai perundingan, dan juga kerja sama bilateral, trilateral maupun multilateral (Perwita & Yadi, 2005). Sedangkan menurut Reynold, hal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara adalah tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik itu dalam aspek keamanan, ekonomi, atau mempertahankan serta mempromosikan nilai (Rosenau et al., 1976).

Dalam prosedur pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu Negara, terdapat dua tahap yang harus dilalui, yaitu proses pembuatan kebijakan luar negeri dan proses pelaksanaan (implementasi) dari kebijakan luar negeri tersebut. Atau dalam penjelasan mudahnya adalah pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan wewenang yang kemudian diawasi serta dikontrol oleh pemerintah secara khusus, kemudian rumusan kebijakan luar negeri diserahkan kepada Departemen atau Kementerian luar negeri untuk dilaksanakan dan diimplementasikan (Baylis et al., 2020).

Dalam penjelasan yang lain, Howard Lentner mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen dasar yang harus ada dalam setiap kebijakan luar negeri, yakni : menentukan tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai (*selection of objectives*), penggunaan instrumen ataupun sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai tujuan tersebut (*mobilization of means*) dan pelaksanaan (*implementation*) dari kebijakan yang terdiri dari berbagai tindakan dan dilaksanakan memulai instrumen yang sudah ditetapkan oleh sebuah negara (Baylis et al., 2020).

Sejak tercapainya perjanjian gencatan senjata pada tahun 1953, hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara telah mengalami berbagai perkembangan dan kemunduran. Dinamika ini dipengaruhi oleh perbedaan ideologi, kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara, serta kebijakan

yang diambil oleh pemimpin masing-masing negara terhadap satu sama lain. Pemerintah Korea Selatan telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dengan tujuan mencapai perdamaian dan menyatukan Semenanjung Korea. Hal ini menjadi salah satu tujuan utama pemerintah Korea Selatan dalam perjalanannya hingga saat ini (Ministry of Unification, 2022).

Setelah terpilih menjadi Presiden Korea Selatan pada tahun 2017, Moon Jae-In dihadapi oleh kondisi buruk hubungan Korea Selatan dan Korea Utara akibat kebijakan *Trustpolitik* yang diterapkan oleh presiden Korea Selatan sebelumnya yaitu Park Geun-Hye. Kebijakan *trustpolitik* adalah pendekatan yang melibatkan pemberian imbalan dan hukuman, di mana Korea Selatan bersedia bekerja sama dalam bidang ekonomi dan memberikan bantuan ketika Korea Utara menunjukkan sikap kerja sama, namun sebaliknya akan Korea Selatan akan memberikan respons negatif jika Korea Utara melakukan tindakan yang dianggap mengancam terhadap tercapainya perdamaian di Semenanjung Korea (Swenson-Wright, 2015).

Untuk memperbaiki kondisi buruk hubungan kedua negara ini, Presiden Moon Jae-In menggunakan kembali kebijakan luar negeri *The Sunshine Policy*, yang sebelumnya diterapkan selama masa pemerintahan terdahulunya yaitu Kim Dae-Jung (1998-2003) dan Roh Moo-Hyun (2003-2008), dianggap oleh Moon Jae-In sebagai landasan untuk memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Moon Jae-In percaya bahwa mempertahankan berbagai pencapaian positif dari masa pemerintahan sebelumnya, khususnya saat menerapkan kebijakan luar negeri *The Sunshine Policy* adalah kunci untuk memulihkan hubungan antara kedua negara tersebut (Mosler, 2017)

Moon Jae-In juga melihat bahwa Korea Utara bukanlah sebuah ancaman tetapi dianggap sebagai partner penting untuk mencapai kemakmuran dan perdamaian di Semenanjung Korea (Cho, 2019). Sehingga Melalui Kebijakan Luar Negeri *The Sunshine Policy* Korea Selatan di bawah Kepemimpinan Presiden Moon Jae-In akan mengedepankan cara-cara damai, bersifat merangkul dan menahan diri dari penggunaan cara-cara keras yang tidak disukai oleh Korea Utara demi tercapainya tujuan utama Korea Selatan yaitu Perdamaian di Semenanjung Korea (Mosler, 2022).

Kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara di bawah pemerintahan Moon Jae-In, yang menerapkan *The Sunshine Policy*, memiliki visi untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea. Untuk mencapai tujuan tersebut, Korea Selatan mengusung tiga prinsip dasar, yaitu : tidak menginginkan jatuhnya rezim pemerintahan di Korea Utara, menolak upaya penyatuan melalui cara paksa atau penyerapan, dan tidak menggunakan alat artifisial untuk mencapai penyatuan. Melalui kebijakan ini, Korea Selatan berharap mencapai

kesepakatan terkait isu nuklir, mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea, dan mengembangkan hubungan yang berkelanjutan antar kedua Korea (Ministry of Unification, 2022).

2) **Diplomasi**

Ronald Peter Barston dalam bukunya yang berjudul *Modern Diplomacy* menjelaskan bahwa diplomasi berhubungan dengan pengelolaan hubungan negara dengan negara lainnya atau negara dengan aktor lainnya. Diplomasi juga tidak hanya berkaitan dengan kegiatan untuk mengakhiri perang atau konflik bersenjata, namun juga berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri oleh negeri. Barston juga menjelaskan bahwa diplomasi adalah sarana yang digunakan oleh negara melalui perwakilan maupun aktor lainnya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya melalui berbagai cara seperti kunjungan, lobi, perundingan, dan kegiatan lainnya (Barston, 2019).

Sedangkan menurut karya tulis John Baylis dan Steve Smith, diplomasi dalam konteks hubungan internasional adalah salah satu dari berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan dan menjalankan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh pemerintah. Sehingga diplomasi sangat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam pengertian yang lain diplomasi juga dapat diartikan sebagai perpaduan ilmu dan seni untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan negara dalam hal yang menyangkut berbagai isu seperti perdamaian, politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan militer ataupun berbagai kepentingan negara lainnya.

Di samping itu, John Baylis dan Steve Smith dalam bukunya menjelaskan bahwa diplomasi adalah istilah yang memiliki makna berbeda. Diplomasi dapat dibagi menjadi dua perspektif yaitu perspektif makro dan perspektif mikro dalam politik dunia (*world politic context*). Dalam perspektif makro, diplomasi adalah pusat kerja dari adanya proses komunikasi dalam sistem global. Di mana jika kejadian mencakup konflik dan kerja sama pada dua kutub yang berlawanan, maka diplomasi ditempatkan di sisi kerja sama, mewakili suatu bentuk interaksi yang berorientasi pada pencapaian penyelesaian konflik melalui dialog dan negosiasi. Diplomasi juga bisa diartikan sebagai usaha untuk menghasilkan stabilitas dalam sistem global serta mencegah timbulnya konflik yang berujung pada terjadinya perang.

Sedangkan dalam perspektif mikro, Diplomasi sangat berkaitan erat dengan aktor-aktor internasional, khususnya negara, dan dapat dianggap sebagai alat dalam kerangka kebijakan luar negeri, bukan hanya sekedar sebagai bagian dari suatu proses global. Dalam konteks ini, semua aktor memiliki tujuan akhir sesuai dengan perumusan kebijakan luar negeri yang dirancang. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, negara sebagai aktor memerlukan alat atau sarana yang efektif. Penggunaan diplomasi dalam konteks kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai penerapan diplomasi sebagai alat kebijakan untuk mendukung aktor internasional dalam mencapai

tujuan kebijakannya. Dan setiap aktor ataupun negara memiliki tujuan, arah, atau perilaku yang bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai (Baylis et al., 2020)

Di masa Kepemimpinan Presiden Moon Jae-In, Kebijakan Luar Negeri *The Sunshine Policy* dilaksanakan dengan cara berdiplomasi dengan Korea Utara. Moon Jae-In selalu mengedepankan prinsip saling percaya dan terbuka ketika berhubungan dengan Korea Utara. Hal ini terbukti menurunkan eskalasi penggunaan nuklir di Semenanjung Korea (Richardson, 2018). Tidak hanya itu dalam pelaksanaan Kebijakan *The Sunshine Policy* menggunakan pendekatan dengan melaksanakan pertemuan dan dialog yang diharapkan mendorong tercapainya perdamaian di Semenanjung Korea dan reunifikasi kedua Korea (Ministry of Unification, 2022).

Pendekatan ini mewujudkan terlaksananya *Inter-Korean Summit* pada 27 April 2018 yang dihadiri oleh kedua pemimpin Korea, Pertemuan ini menghasilkan perjanjian yang dikenal sebagai Deklarasi Panmunjom. Deklarasi Panmunjom antara Korea Selatan dan Korea Utara mencakup tiga poin utama yaitu : pertama, Korea Selatan dan Korea Utara setuju untuk meningkatkan hubungan kedua negara yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan reunifikasi di Semenanjung Korea. hal ini direalisasikan dengan melaksanakan segala kesepakatan yang sudah dicapai seperti mendirikan kantor bersama di wilayah Kaesong dan melakukan kerja sama dalam berbagai bidang seperti pelaksanaan reuni keluarga yang terpisah akibat perang, mengirimkan delegasi yang berada di bawah bendera unifikasi di berbagai ajang internasional seperti *Asian Games 2018* di Indonesia & Olimpiade Musim Dingin di Pyongchang Korea Selatan pada tahun 2018 serta menyelesaikan isu-isu kemanusiaan bersama dengan palang merah (K. Choi, 2020; He-Suk, 2018). Yang Kedua, Korea Selatan dan Korea Utara setuju untuk mengurangi ketegangan militer dengan cara menghentikan berbagai bentuk permusuhan dan menciptakan zona damai di garis batas utara. Yang Terakhir, Kedua negara sepakat untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Semenanjung Korea, dengan menyetujui untuk tidak melakukan aksi militer, mengurangi pengeluaran militer serta melaksanakan dialog antara Korea Selatan-Korea Utara demi mewujudkan perjanjian damai demi menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk mewujudkan perdamaian yang abadi dan menyeluruh di Semenanjung Korea (He-Suk, 2018; United Nations General Assembly, 2018).

Melalui Kebijakan luar Negeri *The Sunshine Policy*, Korea Selatan melakukan dialog dan kerja sama dalam berbagai bidang seperti Sosial-Budaya, Sipil, Kemanusiaan, ekonomi dan militer dengan berpartisipasi bersama dalam kompetisi internasional, melakukan pertandingan persahabatan, serta pertukaran dalam budaya dan juga teknologi dibuktikan dengan pelaksanaan festival musik, serta pembentukan tim survei gabungan dan kerja sama dalam memodernisasi jalan raya dan kerja api (CNBC Indonesia, 2018). Berbagai pertukaran dan kerja sama berbagai bidang ini adalah sebuah upaya meningkatkan hubungan bilateral yang baik antar kedua negara.

D. Hipotesis

Dari permasalahan yang ada dan didukung oleh kerangka pemikiran yang relevan, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai jawaban sementara, bahwa dalam implementasi kebijakan *The Sunshine Policy* Korea Selatan terhadap Korea Utara di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-In Tahun 2017-2022 dilakukan melalui diplomasi dengan cara :

1. Dialog dengan Korea Utara dan menghasilkan Deklarasi Panmunjom yang menjadi landasan antara Korea Selatan dan Korea Utara untuk melakukan pertukaran dan kerja sama dalam berbagai bidang.

E. Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang serta pertanyaan penelitian yang muncul di skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Luar Negeri *The Sunshine Policy* Korea Selatan Terhadap Korea Utara Di bawah Kepemimpinan Presiden Moon Jae-In Tahun 2017-2022”.

F. Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian ditentukan dari tahun 2017 hingga 2022 disaat presiden Moon Jae-In mulai menjabat sebagai presiden Korea Selatan setelah menggantikan presiden sebelumnya yaitu Park Geun-Hye. Setelah menjabat sebagai presiden, Moon Jae-In mengganti kebijakan luar negeri Korea Selatan dari kebijakan yang konservatif dan keras dalam menghadapi Korea menjadi kebijakan *The Sunshine Policy* yang merupakan kebijakan yang bersifat merangkul dan bertujuan untuk menjalin kembali hubungan baik dengan Korea Utara. Masa jabatan presiden Moon Jae-In pada tahun 2022 menjadi tanda berakhirnya kebijakan *The Sunshine Policy* yang diterapkan olehnya.

Sehingga, penulis menetapkan batasan masalah pada Implementasi kebijakan luar negeri Korea Selatan *The Sunshine Policy* terhadap Korea Utara selama masa pemerintahan Moon Jae-In, yaitu dari tahun 2017 hingga 2022. Rentang waktu ini mencakup periode resmi kepemimpinan Presiden Moon Jae-In sejak pelantikannya pada 10 Mei 2017 hingga berakhir masa jabatannya pada 9 Mei 2020. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan luar negeri *The Sunshine Policy* terhadap Korea Utara.

G. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan elemen-elemen penelitian seperti asumsi, nilai, gambaran, dan pendapat sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan jelas dalam hasil akhir penelitian (Creswell & Creswell, 2018).

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) serta menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif yaitu studi analisis

deskriptif berdasarkan referensi data sekunder yang berasal dari jurnal, artikel, buku, surat kabar, majalah serta dokumen-dokumen lainnya dengan menggunakan kerangka pemikiran agar mengelaborasi permasalahan dalam skripsi ini dengan jelas.

H. Sistematika Penelitian

Dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB, dengan sistematika penulisan yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

- BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II : Berisi tentang latar belakang sejarah dan dinamika konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara, serta kebijakan *The Sunshine Policy* sebelum era Presiden Moon Jae-In.
- BAB III : Berisi tentang kebijakan dan implementasi Kebijakan luar negeri *The Sunshine Policy* di masa pemerintahan Presiden Moon Jae-In Tahun 2017 hingga 2022.
- BAB IV : Berisi tentang kesimpulan yang akan menjelaskan ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis yang diperoleh dari hasil analisis sebelumnya.